

**ANALISIS PERTIMBANGAN PEMBERIAN REMISI BAGI
KORUPTOR YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI *JUSTICE
COLLABORATOR***

Aysah Sri Mulyanti

Abstrak

Penulisan ini dilakukan untuk menganalisis urgensi pengaturan remisi bagi narapidana koruptor serta pengaturan ideal mengenai persyaratan *justice collaborator* bagi narapidana korupsi di masa mendatang. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara analisa kualitatif dengan teknik Deskriptif Analisis Preskriptif yaitu menganalisa dan menjelaskan dari berbagai penjelasan yang dipaparkan dari bahan hukum yang ada yang kemudian merumuskan suatu bentuk rekomendasi perbaikan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang (UU) yang mengatur pembatasan hak remisi bagi tindak pidana tertentu termasuk korupsi. UU yang mengatur secara tegas tentang syarat remisi untuk bersedia menjadi *Justice Collaborator* (JC) seperti PP Nomor 99 Tahun 2012. selain itu UU tersebut dapat mengakomodir kelemahan penerapan JC, sehingga tujuan dari JC dapat terpenuhi. Pertimbangan remisi sebagai penghargaan (*reward*) atas kerjasama dengan Aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materil, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan dengan menyita aset kekayaan pelaku hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

Kata Kunci : Korupsi, Pertimbangan Remisi, Justice Collaborator

***ANALYSIS OF REMISSION CONSIDERATIONS FOR CORRUPTORS
POSITIONED AS JUSTICE COLLABORATORS***

Aysah Sri Mulyanti

Abstract

This writing was conducted to analyze the urgency of remission arrangements for corrupt convicts and the ideal setting regarding the requirements of justice collaborator for corruption convicts in the future. In this paper, the author uses the Normative Juridical Method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the data analysis in this study will be presented in a qualitative analysis with the descriptive technique of Prescriptive Analysis, namely analyzing and explaining the various explanations presented from existing legal materials which then formulate a form of recommendation for regulatory improvement. Based on the results of this study, the authors conclude that legislation is needed, especially the law that regulates the limitation of remission rights for certain crimes including corruption. The law that explicitly regulates the requirements for remission to be willing to become a Justice Collaborator (JC) is like PP No. 99 of 2012. Besides that, the law can accommodate the weaknesses of the application of JC, so that the objectives of the JC can be fulfilled. Consideration of remission as a reward for cooperation with law enforcement officials in uncovering material truths, so that state losses can be recovered by confiscation of the assets of the perpetrators of corruption to be returned to the state.

Keywords: Corruption, Remission Considerations, Justice Collaborator